

**TUNGGAKAN PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
JAKARTA PUSAT NOMOR. REG PERKARA:
2062/PID.B/2007/PN.JKT.PST)**

Dede Khairul Fadli

ABSTRAK

Dalam Tindak Pidana Korupsi, selain terpidana dijatuhi pidana hukuman badan juga dijatuhi pidana tambahan antara lain pidana pembayaran uang pengganti yang besarnya sebanyak-banyak sama dengan harta yang diperoleh dari korupsi. Akhir-akhir ini, persoalan pembayaran uang pengganti mengundang perhatian luas di kalangan publik. Banyaknya kasus korupsi yang menggantung dan belum terselesaikan uang penggantian. Hal ini terjadi di berbagai wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tunggakan Uang Pengganti yang masih dalam proses di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dapat dilihat dari laporan Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi total berjumlah Rp.32.847.741.200,.

Penelitian ini berkenaan dengan uang pengganti sebagai hukuman tambahan. Dalam penelitian ini terdapat dua permasalahan yaitu pertama, Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dikaitkan dengan hukuman badan dan bagaimana mencegah terjadinya tunggakan uang pengganti melalui optimalisasi penyelidikan, penyidikan dan peran masyarakat dalam pidana khususnya yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. Reg Perkara 2062/Pid.B/2007/PN.Jkt.Pst?, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti data sekunder berupa bahan-bahan primer, sekunder, dan tersier.

Hasil dari penelitian ini adalah menggambarkan bahwa pelunasan uang pengganti melalui hukuman badan sebagai upaya alternatifnya adalah tuntutan subsider pidana penjara. Untuk itu Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan subsider tersebut harus mencantumkan subsider hukuman penjara tuntutan subsider tersebut harus pula hukuman maksimal sesuai pasal undang-undang tindak pidana korupsi yang dilanggar. Kemudian pengembalian kerugian negara melalui uang pengganti merupakan hal yang sangat penting, karena uang tersebut dapat dipergunakan untuk melanjutkan pembangunan. Pengembalian tersebut tidaklah mudah karena: proses peradilan tindak pidana korupsi pada umumnya membutuhkan waktu yang lama, sehingga terpidana mempunyai kesempatan untuk mengalihkan atau menyembunyikan harta bendanya yang berasal dari tindak pidana korupsi. Selanjutnya Tindak pidana korupsi merupakan extra ordinary crimes, dimana pelakunya adalah kalangan intelektual dan mempunyai kedudukan penting, sehingga mudah untuk mengalihkan/menyembunyikan harta bendanya yang berasal dari hasil korupsi. terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Kata Kunci : Uang Pengganti, Korupsi, Putusan Pengadilan

***MONEY SUBSTITUTE FOR ADDITIONAL PUNISHMENT IN CORRUPTION
(CASE STUDY ADDITIONAL PENALTIES THE SUBSTITUTE FORM***

**OF PAYMENT ARREAS STILL BEING IN CENTRAL JAKARTA
DISTRICT COURT DECISION NUMBER. REG.
CASUS:2062/PIDB/2007/PN.JKT.PTS)**

Dede Khairul Fadli

ABSTRACT

In Corruption, in addition to convict sentenced to corporal punishment was also sentenced to an additional include criminal Compensation magnitude as-much the same as the property obtained from corruption. Lately, the issue of payment of restitution invite widespread concern among the public. The number of cases of corruption hanging and unresolved successor money. It occurs in various jurisdictions Court of Central Jakarta. Substitute Money arrears are still in progress at the Central Jakarta District Court can be seen from the report of Corruption Money Substitutes total amount to Rp.32.847.741.200, This study with regard to restitution as an additional punishment. In this study, there are two problems: first, how the procedure redemption form of additional punishment for compensation associated with corporal punishment and how to prevent arrears restitution through the optimization of inquiry, investigation and criminal role of the community in particular those contained in the Central Jakarta District Court Decision No. . Reg Case 2062 / Pid.B / 2007 / PN.Jkt.Pst. The method used in this thesis is a normative legal research, namely legal research conducted by examining secondary data in the form of primary materials, secondary, and tertiary. In writing this essay done with qualitative analysis, which aims to provide an overview of systematic and logical description of the opinion as well as in-depth analysis of the data obtained in the draw appropriate conclusions from the results of the study and answer the problems faced. The results of this study illustrate that the repayment of the money is through the replacement of corporal punishment as a subsidiary alternative is imprisonment charges. To the Public Prosecutor in addition to its claim must include the subsidiary imprisonment subsidiary claims must also be the maximum penalty under article laws are violated corruption. Then the return loss of the state through replacement money is very important, because the money can be used to continue the development. The return is not easy because: judicial corruption process generally takes a long time, so that the convicted person has the opportunity to transfer or hide his property derived from corruption. Further Offence is an extraordinary crimes of corruption, where the culprit is the intellectual circles and has an important position, making it easy to transfer / hide belongings from the proceeds of corruption. In connection with the Article 18 paragraph (2) of Law No. 31 of 1999 on the Eradication of Corruption crime as amended by Act No. 20 of